



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ALI MASYHAR**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHH : **735650**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.465.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI , Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 970 m2/12 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
6. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 626 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , Rp. 700.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/48 m2 di KAB / KOTA KENDAL, Rp. 365.000.000
9. Tanah Seluas 2.680 m2 di KAB / KOTA KENDAL, Rp. 300.000.000
10. Tanah Seluas 309 m2 di KAB / KOTA DEMAK, Rp. 200.000.000
11. Tanah Seluas 568 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , Rp. 500.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	505.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX Tahun 2024, HASIL SENDIRI	Rp.	500.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	19.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	723.014.886
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	6.712.764.886
III. HUTANG	Rp.	405.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.307.764.886

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.